

BAB IV

**ANALISIS ISU-ISU
STRATEGIS**

**RPJMD
2011-2015**

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Perspektif selama 5 tahun ke depan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011-2015 didasarkan pada kondisi objektif saat ini dan masa lalu dan diprediksi kedepan. Prediksi dilakukan terhadap indikator-indikator pembangunan yang bersifat makro baik ekonomi, politik, maupun sosial. Perspektif Provinsi Kalimantan Selatan untuk lima tahun kedepan dijabarkan kedalam permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, yang akan diuraikan sebagai berikut :

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.1.1 Geomorfologi dan Iklim

- a. Peningkatan eksploitasi sumber daya alam akan mengakibatkan terjadinya perubahan bentang alam yang pada gilirannya terganggunya kelestarian lingkungan
- b. Perubahan iklim global berpengaruh terhadap perubahan iklim daerah perlu diantisipasi dalam rangka peningkatan kegiatan produksi di daerah
- c. Potensi sumber daya alam yang dimiliki akan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan mengacu rencana tata ruang yang ada

4.1.2 Demografi

- a. Tingkat pertumbuhan penduduk yang masih tinggi akan berakibat pada tingginya kebutuhan akan sarana dan prasarana dasar seperti pendidikan dan kesehatan
- b. Distribusi penduduk yang belum merata, yaitu masih terpusat di sekitar Kota Banjarmasin untuk itu diperlukan distribusi manusia dan kegiatan ekonomi di pusat-pusat kegiatan lain
- c. Terjadinya peralihan pekerjaan penduduk Kalimantan Selatan dari pertanian ke non pertanian dimana tahun 1997 sebanyak 97,9% menjadi 49,1% tahun 2005
- d. Masih tingginya angka pengangguran tahun 1996 sebesar 0,3% tahun 2005 menjadi 6,2%
- e. APK dan APM mengalami peningkatan namun masih perlu didorong sehingga peningkatannya dapat lebih tinggi lagi serta penduduk usia sekolah dapat mengakses pendidikan secara merata
- f. Masih adanya penyakit yang dialami oleh penduduk seperti TB Paru dan ISPA yang cenderung meningkat.
- g. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel sejak tahun 1999 hingga 2005 menunjukkan peningkatan, yaitu tahun 1999 sebesar 62,2 dan tahun 2005 67,4

namun secara peringkat Nasional menunjukkan penurunan dimana tahun 1999 urutan ke-21 dan tahun 2005 pada urutan ke-26

4.1.3 Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

4.1.3.1 Ekonomi

- a. Pertumbuhan ekonomi belum optimal. Menciptakan kemajuan perekonomian 20 tahun mendatang, dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan, untuk dapat mewujudkan secara nyata kemajuan daerah Kalimantan Selatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.
- b. Struktur perekonomian belum kokoh. Membangun struktur perekonomian yang kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif, dimana sektor pertanian dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien, sehingga menghasilkan komoditas yang berkualitas, dan berkembangnya industri yang berdaya saing, sehingga sektor perdagangan dan jasa perannya meningkat dengan pesat sebagai motor penggerak perekonomian Kalimantan Selatan.
- c. Daya saing ekonomi jika dilihat dari nilai komoditas ekspor non migas masih bertumpu pada Pertambangan (78%) dimana Komoditas Batu Bara di dalamnya meliputi hampir 70%, dilain pihak produk ekspor lainnya tidak ada yang berkembang secara signifikan sehingga perlu usaha-usaha untuk dapat ditingkatkan lagi ekspornya. Hasil olahan kayu semakin menurun, penerimaan bagi hasil pertambangan juga sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai ekspornya.
- b. Masalah yang dihadapi oleh produk andalan daerah, adalah berupa masih relatif rendahnya tingkat produksi, produktivitas dan mutu produk dan mutu hasil panen sektor pertanian pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan relatif masih rendah.;
- c. Belum berkembangnya industri pengolahan yang mengolah hasil-hasil pertanian, rendahnya mutu pengemasan, belum adanya standarisasi produk;
- d. Terbatasnya modal, iptek, dan informasi pasar untuk menunjang kegiatan usaha, khususnya untuk Usaha Kecil dan Menengah, serta terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, khususnya pada sentra-sentra produksi;
- e. Belum tertatanya kawasan/area pengelolaan pertambangan dan rendahnya kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang.
- f. Belum terpenuhinya kebutuhan energi listrik sesuai tingkat perkembangan yang ada dan jumlah desa yang berlistrik baru mencapai 86,5% dari jumlah desa yang ada di Kalimantan Selatan.
- g. Tingkat ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota dalam provinsi masih cukup tinggi dan menetap. Hal ini terlihat dari nilai Index Williamson sebesar 0,93 baik pada 2003 maupun ketika tahun 2005. Tingkat ketimpangan di berbagai satuan wilayah pengembangan cukup bervariasi. Di wilayah Banua Enam tingkat ketimpangan cukup tinggi dan menetap yaitu IW 0,84; begitu pula di wilayah pengembangan Kayutangi sebesar IW 0,81. Sementara di wilayah Tanah Bumbu

dan sekitarnya pemerataan relatif lebih moderat dan lebih baik yaitu IW 0,51 pada 2005. Tingkat pemerataan antar SWP di Kalimantan Selatan ternyata relatif lebih moderat dan merata. Secara kluster, wilayah Banua Enam, Tanah Bumbu dan Sekitarnya, dan Kayutangi cukup merata antara satu dengan yang lain yakni sekitar IW 0,66.

- h. Belum terinventarisasinya secara maksimal potensi energi baru terbarukan sebagai sumber energi pengganti minyak bumi dalam rangka mendukung diversifikasi energi.
- i. Belum termanfaatkan gas metana batubara (CBM) sebagai sumber energi alternatif.
- j. Belum termanfaatkannya energi baru terbarukan sebagai sumber energi murah dan ramah lingkungan.
- k. Daya tarik daerah terhadap iklim investasi masih belum optimal, penyebabnya antara lain ketersediaan infrastruktur yang masih terbatas, prosedur perizinan yang masih dirasa sulit, kualitas pelayanan serta SDM yang masih rendah.
- l. Daya saing produk lokal masih rendah baik untuk pasar lokal maupun global (AC-FTA). Kondisi ini perlu adanya terobosan dalam perluasan akses pasar tujuan ekspor disamping perlu penerapan SNI secara lebih efektif.
- m. Masih rendahnya akses UMKM terhadap sumberdaya produktif (modal, iptek, bahan baku, informasi pasar, dan sebagainya).
- n. Minimnya akses permodalan terhadap perbankan, karena untuk mendapatkan modal dari perbankan diperlukan agunan yang selama ini tidak dapat dipenuhi oleh kebanyakan UMKM di Kalsel. Untuk itu pemerintah perlu memfasilitasi terhadap akses permodalan dan memberi penjaminan untuk mendapatkan modal dari pihak perbankan.
- o. Belum optimalnya promosi produk UMKM.
- p. Tantangan yang dihadapi oleh usaha besar adalah masalah infrastruktur seperti belum optimalnya pelayanan energi listrik yang mendukung kelancaran produksi dan peningkatan produktivitas, serta kurangnya kepastian hukum untuk berusaha (terkait RTRW belum dituntaskan oleh pemerintah pusat).

4.1.3.2 Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

a). Sumberdaya Alam

- a. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat.
- b. Perlindungan terhadap Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan.
- c. Banyaknya lahan-lahan bekas tambang yang perlu direklamasi dan direhabilitasi sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
- d. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam belum memperhatikan kaidah kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
- e. Peningkatan aktifitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya tidak memperhatikan dampak yang akan ditimbulkannya seperti banjir, longsor.

- f. Pemahaman para pihak terhadap aspek tata ruang dalam mendasari kegiatan pembangunan terutama dengan terbitnya Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- g. Banyak peraturan perundang sektoral belum sinkron dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang sehingga kegiatan pembangunan akan menimbulkan konflik pemanfaatan ruang.
- h. Peningkatan kegiatan pembangunan yang terus berlangsung membutuhkan payung hukum seperti RTRW, sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana dan tidak terjadi konflik antar pemangku kepentingan.
- i. Sebaian besar kabupaten/kota belum memiliki kawasan hutan kota minimal 30% dari luas daerah sesuai dengan amanat perundang-undangan.
- j. Kerusakan hutan dan lahan termasuk hutan mangrove semakin meningkat.

b). Lingkungan Hidup

- a. Kalimantan Selatan termasuk wilayah yang mempunyai titik panas terbanyak di Indonesia, sehingga merupakan penyumbang emisi yang besar.
- b. Penerapan *good mining practice*, pencegahan *illegal logging*, dan *illegal fishing* belum optimal.
- c. Kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau dan banjir pada saat musim hujan, frekuensi dan kualitasnya cenderung meningkat.
- d. Pertambangan mengakibatkan turunnya air permukaan dan berdampak terhadap budidaya perikanan dan pertanian belum ditangani serius.
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kontribusi lingkungan bagi kesejahteraan
- f. Peningkatan curah hujan dan peningkatan air laut yang mengancam infrastruktur jalan nasional.

4.1.4 Sosial Budaya dan Agama

- a. Keterbatasan sumber daya dalam menangani masalah PMKS.
- b. Pondok pesantren merupakan *centre for excellen* bagi transformasi masyarakat sipil didaerah ini khususnya berperan dalam usaha peningkatan pengetahuan keagamaan dikalangan generasi muda.
- c. Masih banyak bidang-bidang usaha jasa pariwisata yang memerlukan investasi bagi perkembangan pembangunan di Kalimantan Selatan.
- d. Meningkatnya arus informasi dan komunikasi yang deras dari luar membawa serta nilai nilai yang tidak sesuai dengan budaya, etika, moral, dan agama.
- e. Semakin merebaknya peredaran narkoba menambah ancaman masa depan masyarakat terutama masyarakat kalangan bawah.
- f. Eksklusivisme pondok pesantren cenderung menyuburkan sikap fanatik terhadap agama
- g. Perda keagamaan cenderung akan menimbulkan pemaksaan pelaksanaan agama terhadap pemeluk agama tertentu, dan berpotensi mengurangi peran ulama serta mendiskriminasi pemeluk agama yang lain.

- h. Pemahaman baru dalam berbagai aliran turut menciptakan kebingungan dalam masyarakat yang pada gilirannya berdampak pada penghayatan dan pengamalan agama yang sudah ada terutama agama Islam.
- i. Kerjasama dibidang ekonomi, sosial, politik dan budaya yang saling menguntungkan diantara anggota etnis/agama yang berbeda akan meningkatkan pemahaman dan penerimaan secara sadar perbedaan dan akan mengurangi fanatisme.
- j. Informasi memegang peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

4.1.4.1 Sosial Budaya

- a. Mengembangkan kehidupan **sosial, budaya dan beragama** sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia mengingat arus globalisasi yang semakin pesat terutama yang berpengaruh negative terhadap kearifan budaya lokal
- b. Pengembangan Sumberdaya manusia mengingat persaingan global kedepan sehingga hanya SDM yang berkualitas yang mampu menjawab segala tantangan kedepan, sehingga upaya peningkatan pendidikan; *peningkatan* kesehatan dan perbaikan kehidupan beragama, sosial, budaya perlu terus dilanjutkan
- c. Masih rendahnya pertumbuhan persentase kunjungan wisata baik dari luar negeri maupun dalam negeri, dikarenakan selama ini kegiatan pelestarian kebudayaan dan kesenian Banjar termasuk kegiatan promosi wisata hanya dalam konteks tataran pelaksanaan pagelaran seni, festival tari, festival sastra, penganugerahan karya cipta seni dan budaya yang diintegrasikan dalam event-event wisata lainnya, sehingga tidak berkembang dinamis, disamping infrastruktur tujuan wisata relatif belum memadai.
- d. Prestasi olahraga relatif mengembirakan dengan tingginya frekuensi beberapa event olahraga, namun demikian penghargaan para olahragawan berprestasi masih rendah diberikan pemerintah sehingga kecenderungan berpindah ke provinsi lain mencari penghidupan ekonomi yang layak atas prestasinya.

4.1.4.2 Kesejahteraan Rakyat

- a. Walaupun tingkat kemiskinan di daerah ini terus mengalami penurunan, tetapi issue kemiskinan tetap merupakan salah satu prioritas pembangunan ke depan.
- b. Pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, di daerah, yang meliputi : (1) Program Pro Rakyat; (2) Keadilan Untuk Semua (Justice For All); dan (3) Pencapaian tujuan Pembangunan Millenium (MDG's), sesuai dengan target nasional.

4.1.5 Infrastruktur

- a. Upaya peningkatan fungsi daerah tangkapan air (*catchment area*) dengan memperbaiki kawasan hutan serta pengembalian fungsi sungai sebagai sarana untuk mengalirkan air hujan atau air permukaan.

- b. Upaya penyediaan prasarana dan sarana transportasi yang lebih baik dan memadai.
- c. Peruntukan lahan untuk kawasan permukiman yang terencana (RTRWK) serta upaya peningkatan keterlibatan dunia usaha, swasta dan masyarakat dalam penyediaan perumahan dan fasilitas pendukungnya.
- d. Pemerintah berpacu untuk mencapai target *Millenium Development Goals* (MDGs) tahun 2015, yakni menurunkan separuh proporsi penduduk yang belum terlayani fasilitas air minum.
- e. Terbukanya kemungkinan pihak swasta dan Pemerintah Kabupaten untuk terlibat dalam penyediaan ketenagalistrikan.
- f. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi dan perkembangan jumlah industri yang terus meningkat, pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kepentingan industri yang tidak terkontrol serta menurunnya kualitas air permukaan akibat pencemaran.
- g. Produksi oleh PLN belum mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan baik rumah tangga maupun industri.
- h. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan pertumbuhan pelayanan yang harus didukung oleh infrastruktur yang memadai seperti infrastruktur jalan, bandara, terminal dan pelabuhan laut. Disisi lain kondisi infrastruktur dimaksud sangat terbatas, sehingga akan mengganggu pergerakan manusia dan barang, yang pada gilirannya akan mengganggu perekonomian daerah. Untuk itu diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur agar segera dilaksanakan agar tidak terjadi stagnan.
- i. Distribusi infrastruktur baik kuantitas maupun kualitas tidak merata antar wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan, mengakibatkan terjadinya kesenjangan perkembangan wilayah, baik di perdesaan maupun di perkotaan.
- j. Sistem pengairan yang mantap diperlukan untuk meningkatkan kegiatan pertanian dalam rangka memenuhi kebutuhan produk pangan dalam daerah dan wilayah sekitarnya.
- k. Semakin meningkatnya kebutuhan kawasan perkotaan yang bersih, indah dan nyaman dengan tingkat layanan infrastruktur perkotaan yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan tingkat pelayanan yang tinggi.
- l. Kebutuhan air bersih yang semakin tinggi serta tingkat layanan yang terus ditingkatkan untuk dapat menjangkau masyarakat.
- m. Perlunya peningkatan kualitas kondisi lingkungan perumahan perkotaan dan perdesaan yang layak huni yang didukung dengan infrastruktur yang baik seperti drainase, jalan lingkungan dan persampahan.
- n. Perlunya peningkatan dan pemeliharaan kualitas infrastruktur yang ada hingga mencapai suatu standar tertentu sehingga pelayanan tidak terganggu.

4.1.6 Penataan Ruang

- a. Pemekaran wilayah dari 11 Kab./Kota menjadi 13 Kab./Kota memerlukan pengalokasian ruang yang jelas

- b. Masih terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang baik antara kawasan budidaya dengan non budidaya atau sebaliknya
- c. Terbitnya UU. No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu dilakukan penyesuaian RTR di daerah

4.1.7 Politik, Pemerintahan dan Hukum

- a. Penetapan Provinsi Kalimantan Selatan mulai tahun 2005 sebagai pilot proyek penyelenggaraan *good governance*, serta kebijakan rencana pemindahan perkantoran pemerintahan provinsi Kalimantan Selatan ke Banjarbaru, mendorong kondusifnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan daerah.
- b. Penetapan rincian urusan oleh pemerintah pusat, mendorong terlaksananya reformasi kelembagaan perangkat daerah di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

4.1.7.1 Politik

- a. Permasalahan politik kedepan semakin kompleks dan perlu penanganan secara komprehensif dan secara bersungguh-sungguh, karena masalah politik akan menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan pembangunan di daerah
- b. Hubungan kerja antara lembaga eksekutif dan legislatif kedepan akan semakin berperan dalam pembangunan, sehingga rekrutmen anggota legeslatif dan kepala daerah akan semakin kompleks.

4.1.7.2 Pemerintahan

(1). Otonomi Daerah

- a. Tidak harmonisnya peraturan perundangan yang ada, sehingga pelaksanaan desentralisasi menjadi kurang optimal.
- b. Belum selesainya penyusunan aturan yang merupakan tindak lanjut dari UU, PP dan dstnya.
- c. Penyerahan kewenangan tidak disertai dengan anggarannya (*money follow function*).
- d. Bagaimana mensinergikan sasaran, program dan kegiatan yang akan dan sedang dilaksanakan, baik secara vertikal (ke atas dengan pemerintah, maupun ke bawah dengan kabupaten/kota), dan secara horisontal dengan provinsi lainnya.
- e. Penguatan Peran Gubernur dan Pemerintah Provinsi, sebagaimana di amanatkan PP 19/2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

(2). Reformasi Birokrasi

- a. Adanya tuntutan dan harapan masyarakat yang besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang transparan, akuntable, adanya kepastian hukum, rasa keadilan serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kebijakan pembangunan.
- b. Kinerja Birokrasi belum optimal.

4.1.7.3 Hukum

- a. Kedepan permasalahan terhadap hukum akan semakin meningkat dan kompleks mengingat semakin tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat dan semakin meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat, sehingga pemerintah daerah dan DPRD dalam membuat produk-produk hukum juga akan semakin kompleks dan meningkat pula
- b. Penegakan perda masih belum optimal dilakukan,
- c. Adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat dan daerah, yang terkadang menyulitkan implementasikan

4.1.8 Sumberdaya Manusia

4.1.8.1. Pendidikan

- a. belum meratanya sebaran sekolah sehingga akses penduduk untuk mendapatkan pendidikan masih belum optimal, oleh karena itu perlu dilakukan pemerataan sarana pendidikan di semua jenjang pendidikan.
- b. Mutu Pendidikan khususnya mutu tenaga pendidik juga belum optimal, mengingat masih banyak guru yang belum bersertifikat
- c. Masih ada sekolah-sekolah dengan kondisi bangunan yang belum memadai untuk menunjang proses belajar dan mengajar.
- d. Menuju sekolah gratis belum optimal, karena masih banyaknya biaya yang ditanggung oleh orang tua murid
- e. Kesejahteraan guru honor khususnya di sekolah sekolah non umum masih sangat rendah.

4.1.8.2. Kesehatan

- a. Pembangunan kesehatan yang menitikberatkan pada pendekatan preventif perlu semakin di galakkan, dengan melakukan peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan diantaranya penyediaan air bersih, sanitasi dan perbaikan lingkungan permukiman kumuh,
- b. Isu pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin dan daerah tertinggal
- c. Perbaikan gizi ibu hamil dan anak terkait dengan pengurangan tingkat kematian ibu dan anak.
- d. Isu terkait dengan pengendalian jumlah penduduk melalui program keluarga berencana,
- e. Isu terkait dengan penyediaan sarana kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu dan lain-lainnya.
- f. Penyediaan tenaga kesehatan belum memadai terutama tenaga bidan dan dokter, disamping itu juga penyebaran tenaga kesehatan belum seimbang masih tertumpuk di perkotaan.

4.1.8.3 Ketenagakerjaan

- a. Hampir 57% Angkatan Kerja di Kalsel berpendidikan SD kebawah dengan tingkat keterampilan yang rendah.
- b. Sebagian besar tenaga instruktur yang ada sudah memasuki usia pensiun sementara kaderisasi tenaga instruktur yang baru belum berjalan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Gedung yang ada adalah bangunan yang sudah tua sehingga tidak lagi representative untuk pengembangan pelatihan, sehingga perlu pembangunan gedung baru.
- d. Peralatan pelatihan keterampilan tenaga kerja sebagian sudah berusia tua (out Of Date) sehingga perlu pengadaan peralatan yang baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

4.2. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan kondisi obyektif dan fakta permasalahan yang ada, maka ditetapkan isu –isu strategis yang akan menjadi dasar perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan selanjutnya, yaitu :

- 1) Pembangunan Manusia
- 2) Daya saing Perekonomian Daerah
- 3) Kemiskinan, Pengangguran dan Ketenagakerjaan
- 4) Degradasi kuantitas dan kualitas Sumberdaya Alam dan Kualitas Lingkungan Hidup
- 5) Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik.

Untuk mengetahui gambaran tentang Isu-isu strategis seperti tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama adalah **Pembangunan Manusia**. Secara faktual Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan menunjukkan peningkatan jika dilihat dari angka absolut dan peningkatan tersebut sejalan dengan IPM nasional. Namun demikian jika dilihat dari peringkat antar provinsi, IPM Kalimantan Selatan masih berada dibawah rata-rata nasional, kondisi ini merupakan gambaran secara komposit yang mencakup tiga bidang sangat mendasar yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*). Peringkat IPM Kalimantan Selatan berada pada urutan 22 (1999), kemudian terus menunjukkan penurunan menjadi urutan ke 23 (2002), 24 (2004), dan menjadi 26 (2005), penurunan peringkat ini dapat dipertahankan untuk tidak menurun lagi sampai dengan tahun 2008. Hal tersebut disebabkan karena adanya upaya untuk meningkatkan angka IPM tersebut, dimana sejak tahun 2005 angka IPM mencapai 67,40 meningkat menjadi 67,70 (2006), 68,01 (2007), 68,72(2008). Peningkatan angka IPM (*reduction shortfall*) selama periode (2007-2008) sebesar 2,20, telah menduduki peringkat 9 dari 10 provinsi yang memiliki reduksi *shortfall* positif. Rendahnya angka IPM tersebut disumbang oleh 6 kabupaten kota yang angka IPMnya berada dibawah angka 70, yaitu Tapin, tabalong, Tanah Bumbu, HSU, Batola, dan

Balangan. Sebaran angka IPM untuk 13 kabupaten /kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 1
Indeks Pembangunan Indonesia di 13 Kabupaten/Kota
se Kalimantan Selatan Tahun 2009

No	Kabupaten/Kota	IPM	Peringkat
1.	Banjarbaru	74,09	1
2.	Banjarmasin	72,85	2
3.	Kotabaru	70,52	3
4.	Tanah Laut	70,40	4
5.	Banjar	70,16	5
6.	HSS	70,11	6
7.	Hulu Sungai Tengah	70,00	7
8.	Tapin	69,79	8
9.	Tabalong	68,98	9
10.	Tanah Bumbu	68,80	10
11.	Hulu Sungai Utara	67,86	11
12.	Barito Kula	66,09	12
13.	Balangan	65,50	13

Kedua adalah **daya saing perekonomian daerah**, meliputi kemampuan ekonomi yang dicerminkan dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu bagian penggunaan atau pengeluaran dalam ekonomi yang membentuk PDRB. Peranan Konsumsi sangat penting dalam membentuk PDRB Kalsel. Komponen lainnya adalah nilai tukar petani (NTP). Sektor pertanian tetap merupakan sektor terbesar dalam pembentukan produk domestik regional bruto di Provinsi Kalimantan Selatan walaupun perannya cenderung menurun. Selain sebagai sektor yang dominan sektor ini juga menyerap tenaga kerja paling banyak. Komponen Infrastruktur. Komponen fasilitas transportasi, air bersih, listrik, telematika, restoran, penginapan dan sektor pariwisata serta keamanan dan ketertiban. sumberdaya lahan pertanian juga merupakan isu strategis yang cukup menentukan daya saing perekonomian daerah. Perkembangan NTP di Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, yaitu dari 82,10 (2005), meningkat menjadi 90,20 (2006), 94,65 (2007), 95,74 (2008) dan 104,76 (2009). Perekonomian Kalimantan Selatan. Perkembangan perekonomian Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2008 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan (yaitu dari 4,98 % (2006), 6,01 % (2007), 6,23 % (2008), dan selanjutnya akibat dampak krisis global tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 5,01 % (2009). Gambaran pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 2
Pertumbuhan Ekonomi di 13 Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan Tahun 2009

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Peringkat
1.	Hulu Sungai Tengah	6,89	1
2.	Banjar	6,28	2
3.	Tabalong	6,22	3
4.	Banjarbaru	5,90	4
5.	Balangan	5,72	5
6.	Tanah Bumbu	5,67	6
7.	Banjarmasin	5,42	7
8.	Kotabaru	5,36	8
9.	Hulu Sungai Selatan	5,27	9
10.	Hulu Sungai Utara	5,25	10
11.	Tanah Laut	5,20	11
12.	Tapin	4,51	12
13.	Barito Kuala	3,05	13

Ketiga adalah kondisi **kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan** juga menjadi perhatian besar. Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan cenderung terus mengalami penurunan, yaitu dari 8,32 % (2006), turun menjadi 7,01 % (2007), 6,48 (2008), 5,12 (2009). Walaupun jumlah penduduk miskin ini menduduki rangking kedua secara nasional setelah DKI Jakarta, tetapi angka kemiskinan masih rentan, karena banyak yang berada disekitar garis kemiskinan. Jika dilihat pola kemiskinan yang terjadi nampak bahwa kemiskinan dipedesaan sedikit lebih tinggi dari perkotaan. Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan disumbang oleh kemiskinan di daerah kabupaten/kota, gambaran jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota pada tahun 2009, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 3
Prosentase Kemiskinan di 13 Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan Tahun 2009

No	Kabupaten/Kota	Kemiskinan (%)	Peringkat
1.	Banjar	3,69 %	1
2.	Banjarmasin	4,80 %	2
3.	Tapin	4,93 %	3
4.	Tanah Laut	5,11 %	4
5.	Banjarbaru	5,20 %	5
6.	Kotabaru	5,55 %	6
7.	Barito Kuala	5,61 %	7
8.	Hulu Sungai Tengah	5,73 %	8
9.	Tanah Bumbu	5,89 %	9
10.	Tabalong	6,83 %	10
11.	Balangan	7,22 %	11
12.	Hulu Sungai Utara	7,29 %	12
13.	Hulu Sungai Selatan	7,32 %	13

Dari aspek ketenagakerjaan pada tahun 2009 jumlah angkatan kerja mencapai 1.754.853 jiwa, dari jumlah tersebut yang bekerja mencapai 1.635.177 jiwa, dan yang menganggur mencapai 118.406 jiwa atau mencapai 6,75 %. Angka Tingkat pengangguran tersebut cenderung terus mengalami penurunan, yaitu dari 7,62 % (2007), terus menurun menjadi 6,79 % (2008) dan 6,75 % (2009). Gambaran besarnya pengangguran di Kabupaten/kota pada tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV. 4
Jumlah Pengangguran di 13 Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan Tahun 2009

No	Kabupaten/Kota	Pengangguran	Peringkat
1.	Balangan	1.473	1
2.	Tabalong	3.653	2
3.	Hulu Sungai Utara	5.706	3
4.	Tapin	5.729	4
5.	Hulu Sungai Selatan	5.813	5
6.	Barito Kuala	6.235	6
7.	Tanah Laut	6.828	7
8.	Banjarbaru	6.883	8
9.	Kotabaru	7.919	9
10.	Hulu Sungai Tengah	8.350	10
11.	Banjar	10.379	11
12.	Tanah Bumbu	10.652	12
13.	Banjarmasin	30.331	13

Keempat adalah *degradasi kuantitas dan kualitas sumberdaya alam dan kualitas lingkungan hidup*. Isu tersebut lebih mengarah kepada upaya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan untuk pencegahan (preventif) bencana. Ragam bencana yang terjadi adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Gambaran tentang kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Selatan, cukup memperhatikan karena berada pada posisi 26 secara nasional, kondisi ini disebabkan oleh indikator kualitas air yang tercemar berat, serta penutupan lahan hanya mencapai 39 %, luas lahan kritis 761.041 Ha, luas lahan terbahai 18.344 Ha serta jumlah titik api (hotspot) 9.172 titik, serta seringnya bencana banjir. Gambaran luas lahan kritis menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV. 5
Luas Lahan Kritis di 13 Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan Tahun 2009

No	Kabupaten/Kota	Luas Lahan Kritis (Ha)	Peringkat
1.	Barito Kuala	0	1
2.	Banjarbaru	4.193	2
3.	Banjarmasin	7.873	3
4.	Hulu Sungai Utara	18.864	4
5.	Tapin	28.839	5
6.	Hulu Sungai Selatan	30.650	6
7.	Hulu Sungai Tengah	41.297	7
8.	Balangan	41.850	8
9.	Tabalong	52.562	9
10.	Tanah Laut	72.237	10
11.	Tanah Bumbu	76.635	11
12.	Banjar	120.953	12
13.	Kotabaru	265.090	13

Kelima adalah **Reformasi birokrasi pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik**. Isu ini ditetapkan sebagai upaya untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional dan berintegritas tinggi dan mampu menyelenggarakan pelayanan prima, serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Beberapa hal pokok yang terkait dengan isu utama ini adalah seperti : kinerja dan disiplin aparatur, tingkat pelayanan publik.